

RUMUSAN
FORUM KEPALA BAPPEDA SE-KTI IV
JAKARTA, 10 DESEMBER 2009

**Tema: “Kontribusi Perencanaan Daerah Berbasis Kewilayaan di KTI terhadap
RPJMN 2010-2014”**

- Forum Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh Forum Kepala Bappeda dan Jaringan Peneliti KTI (JiKTI) adalah wahana yang menjembatani interaksi stakeholders melalui berbagi pengalaman (*sharing experience*), solusi cerdas, dan inovasi sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan di KTI.
- RPJMN 2010-2014 yang disusun secara teknoratis dan partisipatif memuat sasaran dan indikasi pagu tahunan, baseline pagu jangka menengah, rencana kerja kerangka pengeluaran jangka menengah tidak lagi merefleksikan daftar keinginan (*wish list*).
- Buku III RPJMN tentang Pembangunan Berbasis Kewilayaan disusun guna mengatasi kesenjangan antar wilayah termasuk peningkatan pelayanan sosial dasar melalui indikator IPM, serta perkembangan ekonomi. Hal ini diharapkan akan memudahkan Kementerian/KL mem-break down program/kegiatan untuk tiap provinsi.
- RPJMN 2010-2014 mengakomodir platform dan ultimate goal pembangunan KTI yang berorientasi kepada pembangunan kelautan. Hal ini selaras dengan misi RPJPN 2005-2025 tentang mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
- KTI memiliki empat wilayah pengembangan (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara dan Papua) dari tujuh wilayah pengembangan yang ada di Indonesia; serta memiliki sumber daya alam yang melimpah, kondisi lingkungan yang masih baik, serta pelaku-pelaku pembangunan yang potensil. Wilayah KTI yang didominasi perairan menjadi pusat keragaman hayati (*biodiversity*) terlengkap di dunia dan menjadi perhatian dunia internasional pada perhelatan World Ocean Summit (WOC) Manado yang bisa menjadi wahana konservasi lingkungan hidup dan pencegahan perubahan iklim.
- Berdasar dari analisa input-output antar wilayah, pertumbuhan KTI justru lebih mendorong pertumbuhan KBI (terutama Jawa-Bali). Sebab, keterkaitan ekonomi antara KTI dan Jawa-Bali ternyata lebih besar daripada keterkaitan antara wilayah-wilayah di dalam KTI.
- KTI harus menciptakan Regional Branding berbasis potensi sumberdaya, kompetensi yang dimiliki serta interaksi dan koordinasi stakeholder; serta menetapkan sasaran/target yang terukur setiap tahunnya.

Rekomendasi

- Perlu dibangun komitmen yang lebih kuat dari departemen yang terkait dengan kebijakan penganggaran dalam akselerasi pembangunan KTI sesuai bingkai RPJMN 2010-2014

- Pemerintah perlu memperhatikan konektivitas atau keterkaitan ekonomi antar wilayah dan mengurangi keterkaitan antara KTI dan KBI secara artificial dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan industry strategis berbasis komoditas lokal.
- Keterbatasan *local endowment factor* pembangunan KTI seyogyanya diantisipasi dengan pengembangan networking dan kerjasama internasional/dukungan donor serta menarik minat berinvestasi pihak swasta.
- Meminta pemerintah agar dapat mengakomodir proyek infrastruktur di setiap provinsi KTI kedalam Blue Book Bappenas.
- Mendorong platform pembangunan KTI berbasis kelautan kedalam National dan Local Agenda Setting dan diadaptasi menjadi regional branding KTI serta mendorong dilaksanakannya revitalisasi pembangunan di bidang kelautan dan perikanan secara menyeluruh.
- Membentuk sebuah Komisi / sekretariat bersama setiap wilayah pengembangan (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara dan Papua) yang bekerja secara fungsional dalam mempromosikan sinergitas dan keterintegrasi antar wilayah pengembangan; dengan mengambil pembelajaran BKPRS di Sulawesi.
- Perlu mendorong pemberian insentif terhadap pengembangan keunggulan-keunggulan komoditi di daerah dan menata ulang mekanisme pengelolaan KAPET melalui Koordinasi dibawah Sekretaris Daerah ditingkat daerah dan Bappenas di tingkat nasional.
- Mendorong pendidikan kejuruan serta pengelolaan pendidikan berbasis kawasan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan misalnya membangun pusat pendidikan perikanan/kelautan di KTI untuk menarik kembali minat studi di bidang tersebut.
- Mendorong kemitraan perencanaan pembangunan antara Bappenas dan Bappeda yang sebaiknya tidak ada terjadi dalam mekanisme subordinasi, memperkuat peran BPS dalam penyediaan data dan statistik, serta mendorong kolaborasi antara Bappeda dengan JiKTI.
- Meminta Bappenas untuk memperhatikan dan mengakomodir secara lengkap usulan-usulan wilayah yang belum masuk kedalam Draft RPJMN dan dilengkapi pada Musrenbang Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Desember 2009.

Tindaklanjut:

- Forum Bappeda se-KTI akan melakukan pengawalan dan monitoring terhadap evolusi RKP Kementrian/Lembaga.
- Audiensi Kepala Bappeda se-KTI dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas.

DAFTAR PESERTA FORUM KEPALA BAPPEDA SE KTI IV

Nama	Institusi
BAPPEDA	
Drs. Alex Rumaseb, MM	Kepala Bappeda Papua
DR. Rosyadi Sayuti, MSC	Kepala Bappeda Nusa Tenggara Barat
Hiron Fernandez	Plt. Kepala Bappeda Nusa Tenggara Timur
Dr. Lucky Longdong, Med	Kepala Bappeda Sulawesi Utara
Drs. Rais Lamangkona, MTP	Kepala Bappeda Sulawesi Tengah
M. Hatta Latief, M.Eng	Kepala Bappeda Sulawesi Barat
Ir. H. Tan Malaka Guntur	Kepala Bappeda Sulawesi Selatan
Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS	Kepala Bappeda Gorontalo/Ketua Pokja Forum KTI
Drs. La Ode Ali Hanafi, MSi	Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara
Ir. M.Z. Sangadji	Kepala Bappeda Maluku
Syafruddin Daerlan	Kabid Perencanaan Bappeda Papua
Ir. A. Sharir, SE	Sekretaris Bappeda Sulawesi Barat
M. Aksan	Bappeda Sulawesi Barat
Aryanto Husain, MSi	Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda Gorontalo
Sofyan Ibrahim	Bappeda Gorontalo
JARINGAN PENELITI KAWASAN TIMUR INDONESIA (JIKTI)	
Alexander Yaku	Focal Point JiKTI Wil. Papua Barat
Ir. Syamsu Barhiman, MS	Focal Point JiKTI Wil. Nusa Tenggara Timur
Prof. Dr. Patta Tope, MA	Focal Point JiKTI Wil. Sulawesi Tengah
Ir. Irwan Bempah, SP, MP	Focal Point JiKTI Wil. Gorontalo
Prof. Ngakan Putu Oka	Focal Point JiKTI Wil. Sulawesi Selatan
Ma'ruf Kasim, S.Pi, M.Si, Ph.D	Focal Point JiKTI Wil. Sulawesi Tenggara
Muhammad Asril Arilaha	Focal Point JiKTI Wil. Maluku Utara
Ir. Aphrodite Milana Sahusilawane	Focal Point JiKTI Wil. Maluku
Ir. H. La Sara, Msi, PhD	Pokja Forum KTI Wil. Sulawesi Tenggara
Abd. Madjid Sallatu, MA	Pokja Forum KTI Wil. Sulawesi Selatan
Maharani	Anggota JiKTI Wil. Nusa Tenggara Barat
Rury Moenandar	Lembaga Partisipasi Pembangunan Maluku (LPPM)

NARASUMBER	
Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D	Direktur Pengembangan Wilayah – Bappenas
Hanny Hendrany	International Training and Thinking Center (ITTC)
MITRA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL	
Matsui Kazuhisa	JICA
Sri Kusumastuti Rahayu	World Bank Conflict
Amin Subekti	WB PREM